



## Implikasi Politik dari Perubahan Kebijakan Kewarganegaraan terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha\*<sup>1</sup>, Ashfiya Nur Atqiya<sup>2</sup>, Kyla Jessica Veda<sup>3</sup>, Azizah Harda Annafi'ah<sup>4</sup>, Imam Aris Utomo<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>2</sup> Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia

<sup>3-5</sup> Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

[Am.mustain.n@gmail.com](mailto:Am.mustain.n@gmail.com)<sup>1</sup>, [Ashfiya.anura@gmail.com](mailto:Ashfiya.anura@gmail.com)<sup>2</sup>, [kylajessicaveda@gmail.com](mailto:kylajessicaveda@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[daryatiharyanto6@gmail.com](mailto:daryatiharyanto6@gmail.com)<sup>4</sup>, [imamarisutomo@gmail.com](mailto:imamarisutomo@gmail.com)<sup>5</sup>

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis : [am.mustain.n@gmail.com](mailto:am.mustain.n@gmail.com)\*

**Abstrac.** *This study explores the political impacts of citizenship policy changes on Indonesia's diplomatic relationships, particularly in the context of globalization and the movement of its diaspora. Indonesia currently maintains a single citizenship policy, preventing its citizens from holding dual nationality. This restriction often complicates the legal and emotional connections of Indonesians living abroad with their home country, while also limiting their economic contributions through remittances and investments. Conversely, many nations have adopted dual citizenship policies to maintain stronger connections with their diaspora and enhance their diplomatic influence. Using a qualitative approach with case studies focusing on countries with large Indonesian diasporas, such as Malaysia, Saudi Arabia, and the United States, this research highlights the potential benefits of dual citizenship. The findings indicate that allowing dual citizenship could strengthen Indonesia's diplomatic ties and increase economic contributions from overseas Indonesians. However, there are challenges to implementation, including concerns over divided loyalty and complexities in legal enforcement. This paper suggests that Indonesia consider a carefully controlled introduction of dual citizenship, taking into account legal protections, economic benefits, and the role of the diaspora in promoting Indonesia's interests abroad.*

**Keyword:** *Implications of Citizenship, Citizenship Case Studies, Impact of Citizenship on Diplomatic Relations.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas implikasi politik dari perubahan kebijakan kewarganegaraan terhadap hubungan diplomatik Indonesia, terutama dalam konteks globalisasi dan pergerakan diaspora. Indonesia saat ini menerapkan kebijakan kewarganegaraan tunggal, yang membatasi warganya untuk memegang kewarganegaraan ganda. Kebijakan ini sering kali menjadi penghalang bagi diaspora Indonesia dalam mempertahankan keterikatan hukum dan emosional mereka dengan tanah air, serta mempengaruhi kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional melalui remitansi dan investasi. Di sisi lain, banyak negara telah mengadopsi kebijakan kewarganegaraan ganda untuk menjaga hubungan erat dengan diaspora mereka dan meningkatkan pengaruh diplomatik. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada negara-negara dengan populasi diaspora Indonesia yang besar, seperti Malaysia, Arab Saudi, dan Amerika Serikat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan ganda berpotensi memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara tersebut, serta meningkatkan kontribusi ekonomi diaspora. Namun, penerapan kebijakan ini menghadapi tantangan seperti potensi konflik loyalitas dan kerumitan dalam penegakan hukum. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia mempertimbangkan penerapan kebijakan kewarganegaraan ganda secara terbatas, dengan memperhatikan perlindungan hukum, kontribusi ekonomi, dan peran diplomasi diaspora dalam menjaga kepentingan nasional.

**Kata kunci:** Implikasi Kewarganegaraan, Studi Kasus Kewarganegaraan, Dampak Kewarganegaraan terhadap Hubungan Diplomatik.

### 1. PENDAHULUAN

Perubahan kebijakan kewarganegaraan di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap hubungan diplomatik dan strategi internasional negara ini. Kebijakan kewarganegaraan mencakup berbagai aspek krusial, seperti kewarganegaraan ganda, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prosedur naturalisasi, yang sering mencerminkan dinamika politik

domestik dan respons terhadap tantangan global. Reformasi kebijakan ini, terutama dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan dampak besar baik di tingkat domestik maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah salah satu tonggak utama dalam reformasi kebijakan kewarganegaraan Indonesia. Undang-undang ini memperkenalkan konsep kewarganegaraan ganda dalam kondisi tertentu dan memperbaharui pengaturan mengenai hak serta kewajiban warga negara. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat hubungan dengan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai negara serta untuk meningkatkan investasi dan menarik talenta global. Namun, kebijakan ini juga membawa tantangan, terutama dalam konteks hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki kebijakan kewarganegaraan ketat.

Negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki kebijakan kewarganegaraan yang ketat, sering kali tidak mengizinkan kewarganegaraan ganda. Kebijakan ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara tersebut, memerlukan penyesuaian dalam strategi diplomatik Indonesia. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi dampak dari perubahan kebijakan kewarganegaraan terhadap hubungan diplomatik dan strategi internasional Indonesia.

Globalisasi telah mendorong banyak negara untuk mengadopsi kebijakan kewarganegaraan yang lebih fleksibel sebagai respons terhadap perubahan demografis dan ekonomi yang cepat. Penelitian oleh Calavita dan Ghosh (2019) menunjukkan bahwa kebijakan kewarganegaraan dapat digunakan untuk menghadapi tantangan globalisasi, seperti migrasi dan integrasi ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan kewarganegaraan Indonesia yang lebih inklusif mungkin menjadi model bagi negara lain, meskipun memerlukan penyesuaian diplomatik untuk mengatasi potensi konflik dengan kebijakan negara lain.

Faktor politik domestik juga mempengaruhi reformasi kebijakan kewarganegaraan. Mardian (2022) menjelaskan bahwa reformasi dalam kebijakan kewarganegaraan sering kali merupakan respons terhadap kebutuhan untuk memperkuat identitas nasional dan mengatasi ketidakadilan sosial di dalam negeri. Reformasi ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan nasional dan kebutuhan untuk beradaptasi dengan tren global, serta untuk memperkuat posisi Indonesia dalam sistem internasional.

Dalam perspektif diplomatik, perubahan kebijakan kewarganegaraan dapat memperkuat atau melemahkan posisi suatu negara dalam sistem internasional, tergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dikelola dan diposisikan. Ikenberry (2021) menggarisbawahi bahwa kebijakan kewarganegaraan yang dikelola dengan baik dapat memperkuat posisi negara dalam

sistem internasional, sedangkan kebijakan yang buruk dapat menyebabkan ketidakstabilan diplomatik. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan kewarganegaraan terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk masa depan.

Beberapa studi tambahan yang relevan termasuk penelitian oleh Harris dan Lee (2018) mengenai tantangan dan peluang kebijakan kewarganegaraan di abad ke-21, serta penelitian oleh Nguyen (2019) mengenai peran kewarganegaraan ganda dalam diplomasi. Penelitian oleh Zhou (2021) juga mengkaji dampak kebijakan kewarganegaraan terhadap hubungan internasional secara komparatif. Jensen dan Kumar (2022) mengeksplorasi evolusi kebijakan kewarganegaraan dalam konteks global, sementara Arnett (2023) dan Wang (2022) memberikan wawasan tentang tantangan dan peluang dalam kebijakan kewarganegaraan di era globalisasi. Studi oleh Santoso dan Wijaya (2023) mengenai dampak kebijakan kewarganegaraan terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara tetangga, serta kajian oleh Roberts dan Sharma (2023) mengenai kebijakan kewarganegaraan dalam konteks globalisasi dan migrasi internasional, juga memberikan perspektif tambahan yang relevan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Untuk menganalisis implikasi politik dari perubahan kebijakan kewarganegaraan terhadap hubungan diplomatik Indonesia, penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian campuran. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dampak kebijakan kewarganegaraan terhadap hubungan diplomatik dan strategi internasional Indonesia. Metode yang akan digunakan terdiri dari studi literatur, analisis dokumen, wawancara mendalam, dan studi kasus.

### **a. Studi Literatur**

Studi literatur akan dilakukan untuk menilai teori dan temuan sebelumnya terkait kebijakan kewarganegaraan dan dampaknya terhadap hubungan diplomatik. Literatur yang relevan akan mencakup buku, jurnal akademik, artikel, serta laporan kebijakan dari berbagai sumber. Studi literatur ini bertujuan untuk mengidentifikasi kerangka teoretis yang relevan, menganalisis tren kebijakan kewarganegaraan global, dan memahami dampaknya terhadap hubungan internasional.

### **b. Analisis Dokumen**

Analisis dokumen akan melibatkan kajian terhadap dokumen kebijakan, laporan resmi, dan peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan. Dokumen-dokumen ini meliputi:

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia .
- Laporan tahunan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia
- Dokumen perjanjian internasional dan bilateral yang relevan
- Pernyataan dan posisi resmi dari negara-negara mitra Indonesia terkait kebijakan kewarganegaraan.

Analisis ini akan membantu memahami bagaimana kebijakan kewarganegaraan Indonesia dirumuskan, diterapkan, serta dampaknya terhadap hubungan diplomatic.

**c. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan mewawancarai berbagai informan kunci, termasuk:

- Pejabat pemerintah Indonesia yang terlibat dalam perumusan dan implementasi kebijakan kewarganegaraan.
- Duta besar atau diplomat yang mewakili Indonesia di negara-negara dengan kebijakan kewarganegaraan ketat.
- Akademisi dan pakar kebijakan internasional yang memiliki keahlian dalam kebijakan kewarganegaraan dan hubungan internasional.

Wawancara ini akan memberikan perspektif langsung mengenai bagaimana kebijakan kewarganegaraan mempengaruhi hubungan diplomatik serta tantangan dan peluang yang dihadapi.

**d. Studi Kasus**

Penelitian ini akan menggunakan studi kasus untuk menganalisis secara mendalam dampak perubahan kebijakan kewarganegaraan di konteks tertentu. Studi kasus yang dipilih meliputi:

- Hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara yang memiliki kebijakan kewarganegaraan ketat, seperti Singapura dan Malaysia.
- Studi kasus mengenai dampak kebijakan kewarganegaraan terhadap hubungan bilateral Indonesia dengan negara mitra utama dalam kerangka ASEAN dan organisasi internasional.
- Studi kasus ini akan dilakukan dengan mengumpulkan data dari laporan resmi, pernyataan publik, dan hasil wawancara.

**e. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari studi literatur, analisis dokumen, wawancara mendalam, dan studi kasus akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik analisis yang digunakan termasuk:

- Analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema utama dalam data kualitatif.
- Analisis konten untuk memahami konteks dan isi dokumen kebijakan serta pernyataan resmi.
- Analisis naratif untuk mengkaji wawancara mendalam dan mengidentifikasi narasi yang berhubungan dengan dampak kebijakan kewarganegaraan.

**f. Kesimpulan dan Rekomendasi**

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini akan menyusun kesimpulan mengenai implikasi politik dari perubahan kebijakan kewarganegaraan terhadap hubungan diplomatik Indonesia. Rekomendasi akan diberikan untuk membantu perumusan kebijakan yang lebih efektif dan strategi diplomatik yang dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.

**3. PEMBAHASAN**

**a. Latar Belakang dan Konteks Kebijakan Kewarganegaraan di Indonesia**

Kebijakan kewarganegaraan Indonesia telah mengalami transformasi signifikan, terutama setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Perubahan ini merupakan respons terhadap kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika global dan tren migrasi internasional yang berkembang pesat. Sebelumnya, Indonesia mengadopsi kebijakan kewarganegaraan yang relatif ketat, yang membatasi kewarganegaraan ganda dan menempatkan banyak restriksi pada status kewarganegaraan ganda.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 merupakan langkah penting dalam reformasi kebijakan kewarganegaraan, karena memperkenalkan fleksibilitas baru, termasuk pengaturan mengenai kewarganegaraan ganda. Reformasi ini dimaksudkan untuk memperkuat hubungan dengan diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia, serta untuk meningkatkan keterlibatan mereka dalam kegiatan sosial dan ekonomi di tanah air. Kebijakan ini juga bertujuan untuk

menarik investasi luar negeri dan talenta internasional yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan teknologi di Indonesia.

Sebelum reformasi ini, Indonesia memiliki kebijakan kewarganegaraan yang sangat ketat, yang hampir tidak memungkinkan adanya kewarganegaraan ganda. Kewarganegaraan ganda hanya diizinkan dalam situasi yang sangat terbatas, seperti untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan campur antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Namun, kebijakan tersebut sering dianggap tidak fleksibel dan tidak sesuai dengan kebutuhan globalisasi dan mobilitas internasional.

**b. Dampak Kebijakan Kewarganegaraan Ganda terhadap Hubungan Diplomatik**

Perubahan kebijakan kewarganegaraan Indonesia untuk memungkinkan kewarganegaraan ganda membawa dampak besar terhadap hubungan diplomatik negara ini. Kebijakan kewarganegaraan ganda yang diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memperkenalkan fleksibilitas baru yang bertujuan untuk memfasilitasi hubungan dengan diaspora dan memperkuat investasi internasional. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan diplomatik, terutama dengan negara-negara yang memiliki kebijakan kewarganegaraan ketat.

- **Kebijakan Kewarganegaraan Singapura**

Singapura adalah salah satu negara yang memiliki kebijakan kewarganegaraan tunggal yang ketat. Warganya diharuskan untuk melepaskan kewarganegaraan asing jika mereka memilih menjadi warga negara Singapura. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kesetiaan dan identitas nasional serta mencegah potensi konflik kepentingan. Ketika Indonesia memperkenalkan kebijakan kewarganegaraan ganda, hal ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan diplomatik dengan Singapura. Warga negara Indonesia yang juga memiliki kewarganegaraan Singapura mungkin mengalami masalah administratif atau hukum ketika berurusan dengan otoritas Singapura.

- **Kebijakan Kewarganegaraan Malaysia**

Malaysia memiliki kebijakan kewarganegaraan ganda yang lebih fleksibel dibandingkan Singapura, tetapi masih membatasi kewarganegaraan ganda dalam beberapa kondisi. Malaysia mengizinkan kewarganegaraan ganda untuk anak-anak dari perkawinan campur dan dalam situasi tertentu, namun tidak semua individu dapat mempertahankan kewarganegaraan ganda secara

permanen. Ketika Indonesia mengadopsi kebijakan kewarganegaraan ganda, hal ini dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan diplomatik, terutama jika ada perbedaan dalam interpretasi dan penerapan kebijakan. Malaysia mungkin mengajukan keberatan atau memerlukan penyesuaian dalam perjanjian bilateral untuk mengatasi perbedaan kebijakan ini.

- **Kebijakan Kewarganegaraan Thailand**

Thailand, meskipun tidak seketat Singapura atau Malaysia, juga memiliki kebijakan kewarganegaraan yang membatasi kewarganegaraan ganda. Thailand mengizinkan kewarganegaraan ganda dalam situasi tertentu, tetapi dengan syarat yang ketat. Kebijakan ini dapat menyebabkan tantangan dalam hubungan diplomatik dengan Indonesia, terutama jika ada kebutuhan untuk menyelaraskan kebijakan kewarganegaraan di kedua negara. Penyesuaian dan negosiasi mungkin diperlukan untuk mengatasi perbedaan dan memastikan bahwa kebijakan Indonesia dapat diterima di Thailand.

**c. Reaksi Internasional terhadap Kebijakan Kewarganegaraan Indonesia**

Reaksi internasional terhadap kebijakan kewarganegaraan Indonesia sangat bervariasi tergantung pada kebijakan kewarganegaraan negara masing-masing dan hubungan diplomatik yang ada. Negara-negara dengan kebijakan kewarganegaraan ganda yang lebih fleksibel cenderung merespons lebih positif, sedangkan negara-negara dengan kebijakan ketat mungkin menunjukkan ketidakpuasan atau mengajukan protes diplomatik.

- **Negara-Negara Eropa**

Negara-negara Eropa seperti Inggris dan Jerman umumnya memiliki kebijakan kewarganegaraan ganda yang lebih terbuka dan melihat kebijakan Indonesia sebagai langkah positif. Inggris, misalnya, mengizinkan kewarganegaraan ganda dan melihatnya sebagai cara untuk memperkuat hubungan dengan diaspora dan memfasilitasi integrasi. Jerman juga memiliki kebijakan kewarganegaraan ganda yang mendukung integrasi migran dan menjaga hubungan dengan diaspora. Reaksi positif ini mencerminkan kesesuaian kebijakan Indonesia dengan kebijakan kewarganegaraan Eropa dan mendukung peningkatan hubungan bilateral serta kerjasama multilateral.

- Negara-Negara Asia Timur

Di sisi lain, negara-negara Asia Timur seperti Jepang, yang memiliki kebijakan kewarganegaraan ketat, mungkin menunjukkan sikap lebih skeptis terhadap kebijakan kewarganegaraan ganda Indonesia. Jepang mengadopsi kebijakan kewarganegaraan tunggal dan sering kali menghadapi tantangan dalam menangani kasus-kasus kewarganegaraan ganda. Ketika Indonesia memperkenalkan kebijakan kewarganegaraan ganda, Jepang mungkin mengajukan protes atau memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi hubungan bilateral.

Dalam beberapa kasus, negara-negara dengan kebijakan ketat mungkin menunjukkan ketidakpuasan terhadap kebijakan Indonesia, dan ini dapat menyebabkan ketegangan diplomatik yang memerlukan penanganan diplomatik yang cermat.

#### **d. Strategi Diplomatik untuk Mengelola Dampak Kebijakan Kewarganegaraan**

Untuk mengelola dampak kebijakan kewarganegaraan terhadap hubungan diplomatik, Indonesia perlu mengadopsi strategi diplomatik yang efektif. Beberapa strategi utama yang dapat diterapkan meliputi:

- Diplomasi Penjelasan

Diplomasi penjelasan melibatkan upaya Indonesia untuk secara proaktif menjelaskan tujuan dan manfaat dari kebijakan kewarganegaraan kepada negara-negara mitra dan komunitas internasional. Ini termasuk memberikan klarifikasi mengenai bagaimana kebijakan kewarganegaraan ganda dapat memperkuat hubungan bilateral dan memfasilitasi kerjasama dalam berbagai bidang. Penjelasan ini juga dapat mencakup aspek administratif dan hukum untuk memastikan bahwa negara-negara mitra memahami bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dan mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul.

- Penyesuaian Kebijakan

Penyesuaian kebijakan adalah strategi yang melibatkan penyesuaian kebijakan kewarganegaraan Indonesia untuk mengakomodasi kebutuhan dan kekhawatiran negara-negara mitra. Misalnya, Indonesia dapat menjajaki kemungkinan penyesuaian dalam kebijakan kewarganegaraan untuk memfasilitasi hubungan yang lebih baik dengan negara-negara dengan

kebijakan ketat. Ini dapat melibatkan perjanjian bilateral atau multilateral yang mengatur hak dan kewajiban kewarganegaraan serta penyalarsan dalam prosedur administratif.

- **Diplomasi Multilateral**

Diplomasi multilateral memainkan peran penting dalam mengelola dampak kebijakan kewarganegaraan. Indonesia dapat berpartisipasi dalam forum-forum multilateral dan organisasi internasional untuk mendiskusikan kebijakan kewarganegaraan dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Forum-forum ini menyediakan platform untuk membangun konsensus dan mengurangi ketegangan dengan negara-negara lain. Diplomasi multilateral juga memungkinkan Indonesia untuk bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menyelesaikan masalah yang mungkin timbul akibat kebijakan kewarganegaraan ganda.

**e. Kasus Studi: Implementasi Kebijakan Kewarganegaraan di Negara Lain**

Studi kasus berikut menunjukkan bagaimana negara-negara lain mengelola kebijakan kewarganegaraan mereka dan dampaknya terhadap hubungan internasional:

- **Amerika Serikat**

Amerika Serikat mengadopsi kebijakan kewarganegaraan ganda yang relatif fleksibel. Negara ini memungkinkan individu untuk memiliki kewarganegaraan ganda tanpa harus melepaskan kewarganegaraan asal mereka. Kebijakan ini membantu AS dalam menarik talenta internasional dan memperkuat hubungan dengan diaspora. Namun, AS juga menghadapi tantangan administratif dan hukum terkait dengan pajak dan hak kewarganegaraan. Pemerintah AS harus menyeimbangkan antara keuntungan dari kebijakan kewarganegaraan ganda dan masalah administrasi yang timbul

#### **4. KESIMPULAN**

Perubahan kebijakan kewarganegaraan Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 memiliki dampak yang signifikan terhadap hubungan diplomatik Indonesia. Penerapan kebijakan kewarganegaraan ganda merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan dengan diaspora, memfasilitasi integrasi global, dan menarik investasi

serta talenta internasional. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan diplomatik, terutama dengan negara-negara yang menerapkan kebijakan kewarganegaraan ketat.

- **Dampak Terhadap Hubungan Diplomatik**

Kebijakan kewarganegaraan ganda Indonesia berdampak langsung pada hubungan diplomatik dengan negara-negara yang memiliki kebijakan kewarganegaraan ketat seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Negara-negara ini menerapkan kebijakan kewarganegaraan tunggal atau membatasi kewarganegaraan ganda, yang sering kali menimbulkan ketegangan dan memerlukan penyesuaian dalam hubungan bilateral. Misalnya, Singapura yang mengharuskan warganya untuk melepaskan kewarganegaraan asing, mengalami ketegangan dengan kebijakan Indonesia yang lebih fleksibel. Demikian pula, Malaysia dan Thailand juga menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kebijakan kewarganegaraan mereka dengan kebijakan Indonesia.

- **Reaksi Internasional**

Reaksi internasional terhadap kebijakan kewarganegaraan ganda Indonesia bervariasi tergantung pada kebijakan kewarganegaraan masing-masing negara. Negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Jerman, umumnya merespons positif terhadap kebijakan ini karena mereka juga menerapkan kebijakan kewarganegaraan ganda yang mendukung integrasi dan hubungan bilateral. Sebaliknya, negara-negara dengan kebijakan kewarganegaraan ketat seperti Jepang mungkin menunjukkan sikap skeptis atau ketidakpuasan, memerlukan penjelasan lebih lanjut dan penyesuaian untuk mengatasi potensi masalah hukum dan administratif.

- **Strategi Diplomatik**

Untuk mengelola dampak kebijakan kewarganegaraan ganda, Indonesia perlu menerapkan beberapa strategi diplomatik. Diplomasi penjelasan sangat penting untuk menjelaskan tujuan dan manfaat kebijakan ini kepada negara-negara mitra dan komunitas internasional. Ini membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman tentang bagaimana kebijakan tersebut dapat memperkuat hubungan bilateral. Penyesuaian kebijakan juga merupakan strategi kunci untuk mengakomodasi kebutuhan negara-negara mitra, sementara diplomasi multilateral dapat digunakan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan melalui forum internasional.

- **Kasus Studi Internasional**

Kasus studi dari negara lain menunjukkan bagaimana kebijakan kewarganegaraan dapat mempengaruhi hubungan internasional. Amerika Serikat, dengan kebijakan kewarganegaraan ganda yang fleksibel, mengalami tantangan administratif namun berhasil menarik talenta dan investasi internasional. Jerman juga menunjukkan bagaimana kebijakan kewarganegaraan ganda dapat mendukung integrasi migran dan hubungan internasional. Di sisi lain, negara seperti Singapura dengan kebijakan kewarganegaraan tunggal ketat menghadapi tantangan dalam menyelaraskan kebijakan dengan negara-negara lain.

### **Rekomendasi**

Berdasarkan analisis ini, beberapa rekomendasi dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan kewarganegaraan Indonesia dan mengelola dampaknya terhadap hubungan diplomatik:

- a. Pengembangan Kebijakan yang Fleksibel**

Indonesia harus mempertimbangkan penyesuaian kebijakan kewarganegaraan untuk mengakomodasi perbedaan dalam kebijakan negara mitra, sambil tetap mempertahankan manfaat dari kebijakan kewarganegaraan ganda.

- b. Diplomasi Proaktif**

Meningkatkan diplomasi penjelasan dengan negara-negara mitra untuk menjelaskan manfaat kebijakan kewarganegaraan ganda dan mengatasi potensi masalah yang mungkin timbul.

- c. Peningkatan Kerjasama Multilateral**

Terlibat aktif dalam forum-forum multilateral untuk mencari solusi yang dapat diterima bersama dan membangun konsensus tentang kebijakan kewarganegaraan.

- d. Studi Kasus dan Analisis Mendalam**

Terus melakukan studi kasus dan analisis mendalam untuk memahami dampak kebijakan di berbagai konteks internasional dan menyesuaikan strategi diplomatik sesuai dengan perkembangan global.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, Indonesia dapat memanfaatkan kebijakan kewarganegaraan ganda untuk memperkuat hubungan diplomatik dan memperluas pengaruh internasional sambil mengelola tantangan yang mungkin timbul dari perbedaan kebijakan dengan negara lain.

## **5. SARAN**

Berdasarkan pembahasan tentang dampak kebijakan kewarganegaraan ganda Indonesia terhadap hubungan diplomatik, berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan ini dan meminimalkan potensi konflik diplomatik:

### **a. Penyesuaian Kebijakan Kewarganegaraan**

Indonesia sebaiknya mempertimbangkan penyesuaian kebijakan kewarganegaraan ganda untuk mencerminkan kepentingan diplomatik dan kebutuhan negara mitra. Misalnya, dalam kasus negara-negara dengan kebijakan kewarganegaraan ketat, Indonesia bisa menjajaki kemungkinan perjanjian bilateral yang memberikan solusi praktis dan fleksibel untuk masalah kewarganegaraan ganda. Penyesuaian ini dapat membantu mengurangi ketegangan diplomatik dan memfasilitasi hubungan yang lebih harmonis.

### **b. Penguatan Diplomasi Penjelasan**

Penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi penjelasan terkait kebijakan kewarganegaraan ganda. Ini melibatkan upaya sistematis dalam menyampaikan informasi yang jelas dan komprehensif mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme penerapan kebijakan kewarganegaraan ganda kepada negara-negara mitra dan komunitas internasional. Melakukan sesi penjelasan, seminar, dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dapat membantu memperjelas kebijakan dan mengatasi kesalahpahaman yang mungkin timbul.

### **c. Kolaborasi Internasional dan Multilateral**

Indonesia harus aktif dalam forum-forum internasional dan multilateral untuk membahas dan menyelaraskan kebijakan kewarganegaraan. Terlibat dalam diskusi internasional tentang kewarganegaraan, migrasi, dan integrasi dapat membantu Indonesia membangun konsensus dengan negara-negara lain dan memfasilitasi solusi yang saling menguntungkan. Partisipasi dalam organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dapat memberikan platform untuk diskusi dan kerjasama yang lebih luas.

### **d. Evaluasi dan Penelitian Berkala**

Melakukan evaluasi berkala dan penelitian mendalam tentang dampak kebijakan kewarganegaraan ganda terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi. Penelitian ini harus mencakup analisis kasus-kasus spesifik serta tinjauan terhadap kebijakan negara-negara lain untuk memastikan bahwa kebijakan Indonesia tetap

relevan dan efektif. Evaluasi ini juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kebijakan.

**e. Peningkatan Dukungan untuk Diaspora**

Memperkuat dukungan bagi diaspora Indonesia di luar negeri untuk memfasilitasi integrasi mereka dalam masyarakat internasional sambil mempertahankan hubungan dengan tanah air. Ini termasuk menyediakan layanan konsuler yang efisien, memfasilitasi akses ke hak-hak kewarganegaraan, serta mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi dan sosial di Indonesia. Dukungan ini akan memperkuat ikatan antara diaspora dan negara asal mereka serta mendukung tujuan kebijakan kewarganegaraan ganda.

**f. Pengembangan Kesadaran dan Pelatihan Diplomatik**

Meningkatkan kesadaran dan memberikan pelatihan khusus kepada diplomat dan pejabat terkait mengenai isu-isu kebijakan kewarganegaraan dan manajemen diplomatik. Pelatihan ini harus mencakup teknik negosiasi internasional, pemahaman mendalam tentang kebijakan kewarganegaraan negara lain, dan strategi untuk mengatasi konflik diplomatik yang mungkin timbul. Dengan meningkatkan keterampilan diplomatik, Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani tantangan yang berkaitan dengan kebijakan kewarganegaraan.

Dengan menerapkan saran-saran ini, Indonesia dapat mengoptimalkan implementasi kebijakan kewarganegaraan ganda, meminimalkan potensi konflik diplomatik, dan memperkuat hubungan internasional. Pendekatan yang hati-hati dan terencana akan memastikan bahwa kebijakan ini memberikan manfaat maksimal bagi negara dan warganya di seluruh dunia.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Arnett, T. (2023). *Global Migration and National Sovereignty: Revisiting Citizenship Policies*. Oxford University Press.
- Calavita, K., & Ghosh, N. (2019). *Immigration and Citizenship: Comparative Perspectives*. Routledge.
- Gordon, A. (2024). "The Role of Citizenship Policy in Shaping International Relations." *Journal of Global Policy and Strategy*, 32(1), 83-99.
- Harris, J., & Lee, A. (2018). "Citizenship Policies in the 21st Century: Challenges and Opportunities." *International Affairs Review*, 22(4), 178-195.
- Ikenberry, G. J. (2021). *Liberal Order and Global Politics: Reexamining the Role of Citizenship Policies*. Princeton University Press.

- Jensen, S., & Kumar, P. (2022). "National Identity and Global Mobility: The Evolution of Citizenship Policies." *Global Policy Studies*, 10(3), 88-104.
- Kumar, R. (2023). "Changing Dynamics in Citizenship Policies: A Study of Southeast Asian Nations." *Asian Political Science Review*, 29(2), 145-162.
- Lee, C., & Martinez, A. (2022). "Citizenship Policy and International Relations: A Global Perspective." *World Politics Review*, 35(2), 112-130.
- Liu, J., & Zheng, Y. (2020). "Globalization and Citizenship Policies: A Comparative Study." *Global Studies Journal*, 15(1), 34-50.
- Mardian, R. (2022). "Reformasi Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Dampaknya Terhadap Hubungan Diplomatik." *Jurnal Hukum Internasional*, 11(2), 150-165.
- Mardian, R. (2022). "Reformasi Hukum Kewarganegaraan Indonesia dan Dampaknya Terhadap Hubungan Diplomatik." *Jurnal Hukum Internasional*, 11(2), 150-165.
- Miller, S., & Zhao, L. (2023). "Citizenship in the Age of Globalization: Comparative Policies and Implications." *Global Governance Journal*, 18(1), 55-72.
- Nguyen, T. (2019). "The Role of Dual Citizenship in Diplomacy: A Case Study of Southeast Asia." *Southeast Asian Studies Journal*, 27(2), 120-136.
- Nguyen, T. (2019). "The Role of Dual Citizenship in Diplomacy: A Case Study of Southeast Asia." *Southeast Asian Studies Journal*, 27(2), 120-136.
- Patel, V., & Singh, R. (2024). "Diplomatic Implications of Citizenship Reforms: A Case Study Approach." *International Diplomacy Journal*, 27(3), 200-220
- Roberts, M., & Sharma, P. (2023). "Citizenship Policies in the Context of Globalization and International Migration." *Journal of International Policy Studies*, 28(3), 141-160.
- Santoso, B., & Wijaya, H. (2023). "Dampak Kebijakan Kewarganegaraan Terhadap Hubungan Bilateral Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga." *Jurnal Diplomasi dan Hubungan Internasional*, 19(1), 75-92.
- Smith, M., & Wright, K. (2023). *Global Citizenship and National Identity: The Changing Landscape*. Cambridge University Press.
- Tan, A. (2021). "Kebijakan Kewarganegaraan Ganda di Asia Tenggara: Studi Kasus Singapura dan Malaysia." *Asian Studies Review*, 45(3), 400-420.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Wang, L. (2022). "Navigating Dual Citizenship: Diplomatic Challenges and Opportunities." *Journal of Global Affairs*, 31(2), 102-118.
- Zhou, X. (2021). "The Impact of Citizenship Policy on International Relations: A Comparative Analysis." *Journal of International Relations*, 30(1), 45-62.